



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Malinau dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKJIP Bappeda dan Litbang Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA) 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disusun.

LKjIP Tahun 2019 juga merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan RENSTRA, RENJA 2019, Perjanjian Kinerja 2019 dan juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Penyusunan LKjIP Bappeda dan Litbang ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Bappeda dan Litbang ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Bappeda dan Litbang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKJIP Bappeda



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019

dan Litbang Kabupaten Malinau ini telah dapat mencerminkan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2019.

Malinau, 17 Januari 2020  
Kepala Bappeda dan Litbang

**Dr. Kristian, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19661123 199503 1 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2019. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda dan Litbang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan-catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD Kabupaten Malinau Tahun anggaran 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mengelola anggaran sebesar Rp 15.787.541.105 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.625.187.524,20 dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.162.353.581,00. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar 93,18% dengan penyerapan dana sebesar Rp 5.741.787.706,00. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda dan Litbang melaksanakan 8 program dan 27 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019

akhir bulan Desember tahun 2019 adalah realisasi fisik sebesar 98,09%.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan perangkat regulasi dari pemerintah Pusat yang belum lengkap.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Malinau, 17 Januari 2020  
Kepala Bappeda dan Litbang



**Dr. Kristian, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19661123 199503 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	v
Lampiran .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Maksud dan Tujuan Laporan.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	1
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang .....	6
D. Isu Strategis .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	10
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	11
2.3 Strategi dan Kebijakan .....	14
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	15
2.5 Perjanjian Kinerja.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>20</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2019 .....	20
3.A.2 Analisis Penyebab Keberhasilan .....	29
3.A.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	29
3.A.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	32
3.A.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 .....	36
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

## LAMPIRAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019

## LAMPIRAN

---

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

---

Tabel 1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

---

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

#### A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda dan Litbang
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

#### A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang

### B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD

**B.1 Kedudukan :**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**B.2 Tugas :**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Prasarana dan Pengembangan Wilayah,

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

**B.3 Fungsi :**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri dari :

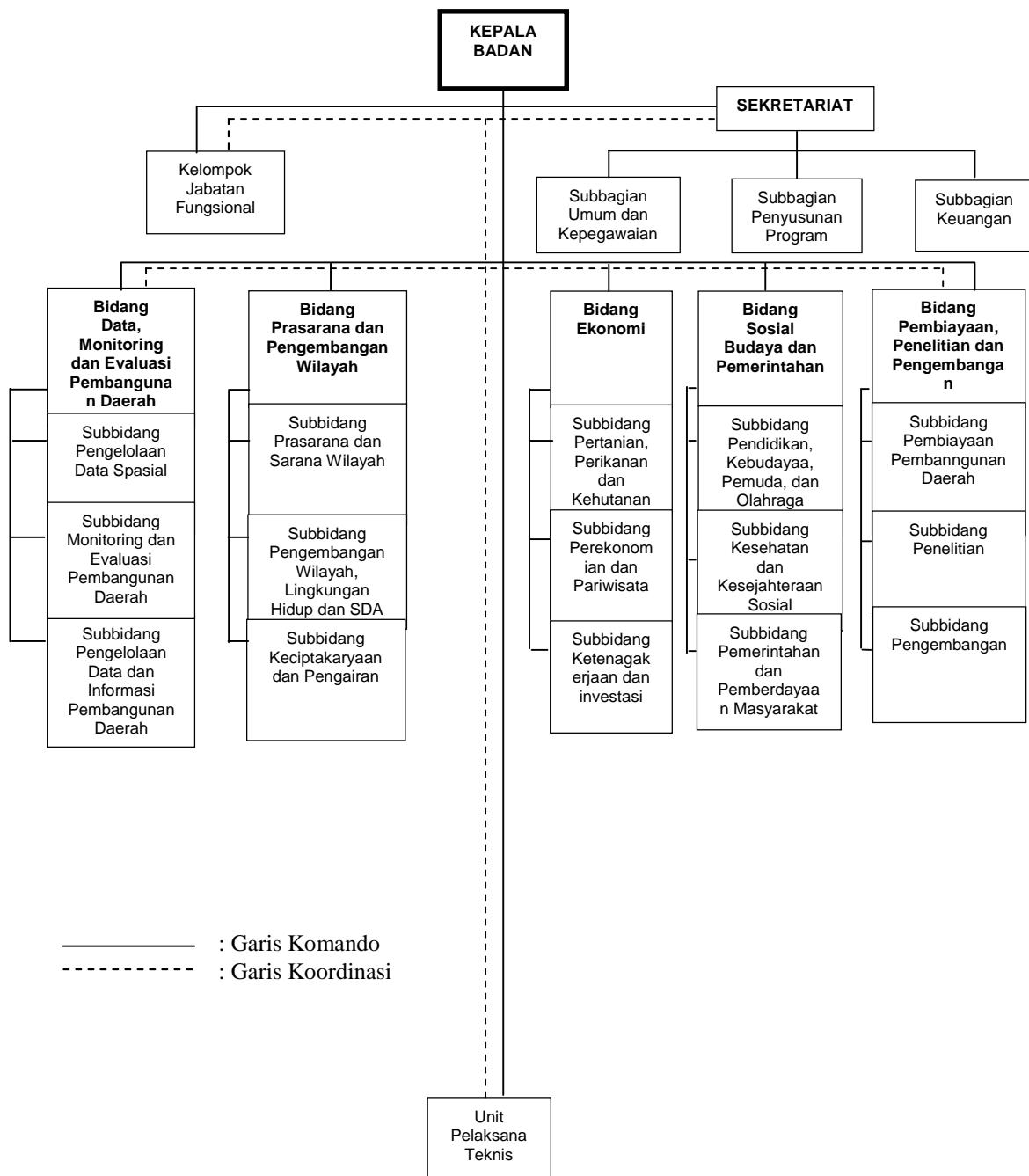
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
  1. Subbagian Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
  1. Subbidang Pengelolaan Data Spasial;

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

2. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
  3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
  3. Subbidang Keciptakaryaan dan Pengairan.
- e. Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
1. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata;
  3. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi.
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  3. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
1. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
  2. Subbidang Penelitian;
  3. Subbidang Pengembangan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG  
KABUPATEN MALINAU**



### **C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Organisasi Bappeda dan Litbang menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya *Standar Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.
9. Belum optimalnya fungsi penelitian dalam menghasilkan kajian-kajian strategis;
10. Belum optimalnya pemanfaatan Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Bappeda dan Litbang;
11. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan;
12. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

13. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD;
14. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
15. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

#### **D. Isu Strategis**

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk isu daerah. Bappeda dan Litbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda dan Litbang, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;
5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output*, *outcome* yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

6. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
7. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan;
8. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dan Litbang dalam mendukung pencapaian misi kedua yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2016-2021, sehingga misi-misi yang menjadi basis tersebut adalah memantapkan implementasi 3 (tiga) program unggulan dan 13 (tiga belas) program utama daerah.

Berdasarkan tujuan dan misi RPJMD di atas, peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang strategis terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bappeda dan Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang partisipatif, akomodatif, efektif dan efisien. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Malinau terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan menentukan misi berupa :

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

1. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi (Misi 2).

**Tabel 2.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah**

NO	Visi : <b>Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangunan (GERDEMA)</b>  <b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih</b>	Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi	Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Percentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	Belum seluruh jenis data pada profil data pembangunan sosial budaya dapat terakomodir

*Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021*

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung pada tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya, selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Bappeda dan Litbang**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-</b>				
				<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Misi 2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%) / Persentase Penduduk Miskin (%)	8,06	7,62	7,2	6,80	6,43
		Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tk. Partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam Musrenbang	36,26	36,73	37,44	38,11	40,21

*Sumber : Subbag Penyusunan Program*

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

### **2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Malinau**

Visi	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
Misi 2	Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah.	

*Sumber : Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*

## 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Bappeda mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Bappeda

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

dan Litbang mendukung pencapaian 1 (Satu) misi Kabupaten Malinau yang tercantum pada Perubahan RPJMD yaitu :

**Misi 2** : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Bappeda sebanyak 3 (tiga) indikator.

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

**Tabel 2.4**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG  
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021**

NO	SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
	SASARAN RENSTRA	SASARAN RPJMD YANG DIACU					
	1	2					
1	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Adanya hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral/bidang	Urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan	BAPPEDA DAN LITBANG	Renstra	
2	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan	ketersediaan jenis data/informasi bidang pembangunan	Urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan	BAPPEDA DAN LITBANG	Renstra	
3	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan	Urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan	BAPPEDA DAN LITBANG	Renstra	

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

## **2.5 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2019 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun (tahun 2019) dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2019 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2019 meliputi sasaran strategis Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Bappeda dan Litbang**  
**Kabupaten Malinau**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	1. Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif 2. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Dokumen

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat</li> <li>2. Meningkatnya efektifitas sistem informasi data yang terpadu</li> </ol>	Dokumen
3	Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana</li> <li>2. Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan pembangunan</li> </ol>	100%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1,724,284,852.00	APBD-P
2	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Rp. 300,000,000.00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 500,000,000.00	APBD
4	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 675,000,000.00	APBD-P
5	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp. 250,000,000.00	APBD
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 660,000,000.00	APBD
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1,933,068,729.00	APBD
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 120,000,000.00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6,162,353,581.00</b>	

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan tatanan, istrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, realisasi sasaran strategis tahun 2019, pengukuran kinerja tahun 2019, analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun 2019.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2019

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda dan Litbang bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Secara rinci capaian masing-masing indikator sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

**Tabel III. 2**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT		
			SATUAN	TAHUN 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Percentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan	Orang/peserta	420	465	100.00	sangat berhasil	
		Jumlah dokumen KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS	Dokumen	4	4	100.00	sangat berhasil		
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD	Dokumen	2	2	100.00	sangat berhasil		
		Jumlah dokumen monev	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil		
		Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan usulan inovasi daerah	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil		

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

		Jumlah dokumen untuk lampiran PPAS dan RKPD	Dokumen	2	2	100.00	sangat berhasil
		Jumlah layanan jaringan internet	mbps	3	3	100.00	sangat berhasil
2 Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	Jumlah buku profile daerah yang tersusun	Buku	5	5	100.00	sangat berhasil
		Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau tahunan	Buku	50	50	100.00	sangat berhasil
	Persentase pengembangan kota-kota menengah dan besar	Jumlah updating dokumen RPIJM keciptakaryaan	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil
		Jumlah dokumen moda transportasi	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil
	Persentase evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi dana gerdema dan RT bersih	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan di bidang social dan budaya	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Laporan	1	1	100.00	sangat berhasil

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

		Jumlah laporan TPB/SDGs	Laporan	1	1	100.00	sangat berhasil
		Jumlah dokumen Kawasan Tanpa Rokok	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil
3	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	Percentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan	Jumlah rapat koordinasi Bappeda & Litbang se-kalimantan utara yang diikuti	Kali/Tahun	1	1	100.00
		Percentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kali/Tahun	25	30	100.00

Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2019 telah memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis, hal ini terjadi karena terdapatnya penambahan anggaran dan kegiatan pada DPA perubahan tahun 2019 serta adanya beberapa penyesuaian kondisi lapangan sehingga menyebabkan capaian kinerja untuk sasaran strategis

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

**Tabel III. 2**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2019**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=10/9*100
1	<b>Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan</b>	1 Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan	Orang/peserta	420	432	102.86	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	600,000,000	584,335,892	97.39
		2 Jumlah dokumen KUA, PPAS- Perubahan dan KUA, PPAS	Dokumen	4	4	100		228,550,000	221,242,925	96.80
		3 Jumlah rapat koordinasi Bappeda & Litbang se-provinsi kaltara yang diikuti	Kali/Kegiatan	1	1	100		75,000,000	73,300,000	97.73
		4 Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Dokumen	2	2	100		200,000,000	199,084,738	99.54
		5 Jumlah dokumen monev	Buku	1	1	100		150,000,000	145,527,800	97.02
		6 Jumlah dokumen untuk lampiran PPAS	Dokumen	2	2	100		320,734,852	295,046,087	91.99

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019

	dan RKPD								
7	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan usulan inovasi daerah	SKPD	1	1	100		75,000,000	73,857,800	98.48
8	Jumlah layanan jaringan internet	mbps	3	3	100		75,000,000	74,146,000	98.86
						<b>Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b>			
1	Jumlah updating dokumen RPIJM Keciptakaryaan	Dokumen	1	1	100		50,000,000	47,865,112	95.73
2	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang PPW yang diikuti	Dokumen	5	5	100		250,000,000	249,057,700	99.62
						<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
1	Jumlah dokumen moda transportasi	Dokumen	1	1	100		500,000,000	497,956,520	99.59
						<b>Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>			
1	Jumlah dokumen evaluasi dana gerdema dan RT	Dokumen	1	1	100		250,000,000	226,401,201	90.56

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

		Bersih							
	2	Jumlah dokumen kegiatan DP3KTNKM	Dokumen	1	1	100		325,000,000	216,637,553
	3	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi yang diikuti	Dokumen	1	1	100		100,000,000	99,743,400
2	<b>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan</b>						<b>Pengembangan data/informasi</b>		
	1	Buku profil daerah	Buku	35	35	100		150,000,000	150,000,000
	2	Jumlah Buku LKPJ Bupati Malinau Tahunan	Buku	50	50	100		100,000,000	98,234,400
	1	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	100	<b>Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	150,000,000	146,333,000
	2	Jumlah laporan TPB/SDGs	Laporan	1	1	100		100,000,000	89,023,983
	3	Tersedianya kawasan tanpa rokok (KTR)	Dokumen	1	1	100		230,000,000	209,951,400
	4	Jumlah koordinasi, konsultasi perencanaan bidang sosial budaya yang diikuti	Kali/kegiatan	25	25	100		180,000,000	179,761,200

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

3 <b>Meningkatkan Kualitas dan Sumber Daya dan Pelayanan Umum Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>									
						<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	1 Jumlah ATK yang tersedia	Jenis	17	17	100		77,178,736	77,146,000	99.96
	2 Jumlah barang cetak dan foto copy	Jenis	2	2	100		10,000,000	9,990,000	99.90
	3 Jumlah kotak makanan rapat	Kotak	770	781	101.43		35,000,000	34,998,000	99.99
	4 Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Kali	25	27	108		660,889,993	644,741,997	97.56
	5 Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	%	100	100	100		1,000,000,000	841,881,898	84.19
	6 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	%	100	100	100		150,000,000	146,320,000	97.55
						<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	1 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 roda 4 & 6 roda 2	8	8	100		20,000,000	109,203,100	91.00

### 3.A.2 Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

### 3.A.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di bidang sumber daya manusia, jumlah staf Bappeda dan Litbang relatif mencukupi untuk menjalankan misi organisasi. Kualitas Sumber Daya Manusia juga berpengaruh pada keterbukaan pada ide-ide baru dan kesediaan untuk berubah dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Oleh karena itu, dari sisi kuantitas, Sumber Daya Manusia di Bappeda dan Litbang merupakan kekuatan organisasi, namun demikian dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia di Bappeda dan Litbang tetap terus ditingkatkan, sehingga diperlukan

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

program dan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bappeda dan Litbang setiap tahunnya.

Prasarana dan sarana merupakan aset berwujud (*tangible assets*) yang berperan penting dalam menunjang roda operasional organisasi. Dengan beban yang ada saat ini prasarana dan sarana dirasakan masih kurang, khususnya terkait sarana data dan informasi sebagai input utama perencanaan pembangunan. Namun demikian, Bappeda dan Litbang memiliki aset tak berwujud (*intangible asset*) yang sangat bernilai bagi eksistensi organisasi, yaitu posisi dan reputasi sebagai “*leading sector*” dalam perencanaan pembangunan daerah. Aset ini menjadi modal yang berharga dalam menjalankan fungsi koordinasi eksternal dan menjembatani konflik kepentingan antar sektor. Fungsi ini pada gilirannya juga melahirkan aset yang lain yakni pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan yang terakumulasi dari tahun ke tahun.

Tingkat efektifitas Anggaran Belanja Bappeda dan Litbang sudah memenuhi kriteria efektif karena realisasi anggaran yang sudah memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pencapaian target program dan kegiatan sudah sangat cukup.

Efisiensi Anggaran Belanja Bappeda dan Litbang sudah sangat bagus. Dalam menghitung tingkat efisiensi, berpatokan pada hal biaya. Dimana, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan didalam mendayagunakan anggaran belanja dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input yang dapat mengacu pencapaian tujuan. Dalam laporan realisasi anggaran belanja Bappeda dan Litbang, faktor-faktor input yang dapat mengacu pencapaian tujuan dimasukkan dalam anggaran belanja langsung. Dimana ada beberapa kegiatan yang dianggarkan dan masuk dalam anggaran belanja langsung.

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

**Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja**

$$\text{EFESIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG}}{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

**Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja**

$$\text{EFETIFITAS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

#### 3.A.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019 dapat diwujudkan dengan baik, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Selanjutnya capaian untuk masing-masing Program dapat dijelaskan pada bagian berikut:

##### **1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 90,79 %. Dengan rincian kegiatan :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)
2. Penyusunan KUA,PPAS-Perubahan dan KUA,PPAS
3. Rapat Koordinasi Bappeda dan Litbang Se-Provinsi Kaltara

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Monitoring evaluasi dana DAK, Bantuan Keuangan dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
6. Perencanaan dan Penyusunan Usulan Inovasi Daerah
7. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Pengembangan jaringan internet data spasial

**2) Program Pengembangan Data / Informasi**

Program Pengembangan Data / Informasi terdiri dari 2 (dua) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :

1. Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Tahunan
2. Penyusunan Profile Daerah Kab. Malinau

**3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program Pembangunan Sosial dan Budaya terdiri dari 4 (empat) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 94,71 %. Dengan rincian kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2. Penyusunan laporan TPB/SDGs
3. Advokasi dan Fasilitasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
4. Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

#### **4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar terdiri dari 2 (dua) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 98,97%. Dengan rincian kegiatan :

1. Updating dokumen RPIJM
2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang prasarana dan pengembangan

#### **5) Program Administrasi Perkantoran**

Program Administrasi Perkantoran terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.933.068.00,- dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,79% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyedian Alat Tulis Kantor
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Makanan dan Minuman
4. Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Pengelola Kegiatan DAK, Bankeu, Dekon dan TP
6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

#### **6) Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 109.203.100.00,- dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,00%. Dengan rincian kegiatan :

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional

**7) Program Perencanaan Pembangunan ekonomi**

Program Perencanaan Pembangunan ekonomi terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 80,41 %. Dengan rincian kegiatan :

1. Evaluasi dana gerdema dan RT bersih
2. Penunjang kegiatan dewan Pembina dan pengendali pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Kayan Mentarang (DP3KTNKM)
3. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi

**8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan Pembangunan ekonomi terdiri dari 1 (satu) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :

1. Penyusunan dokumen moda transportasi

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019*

3.A.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

**TABEL III. 3**

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	
				TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	2	3	5	6	7
1	<b>Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan</b>	1 Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan	Orang/peserta	420	420
		2 Jumlah dokumen KUA, PPAS- Perubahan dan KUA, PPAS	Dokumen	4	4
		3 Jumlah rapat koordinasi Bappeda & Litbang se-provinsi kaltara yang diikuti	Kali/Kegiatan	1	1
		4 Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)	Dokumen	2	2
		5 Jumlah dokumen monev	Buku	0	1
		6 Jumlah dokumen untuk lampiran PPAS dan RKPd	Dokumen	0	2
		7 Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan usulan inovasi daerah	SKPD	0	1
		8 Jumlah layanan jaringan internet	mbps	0	3
		9 Jumlah updating dokumen RPIJM Kciptakaryaan	Dokumen	0	1
		10 Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang PPW yang diikuti	Kali/Kegiatan	0	5
		11 Jumlah dokumen moda transportasi	Dokumen	0	1
		12 Jumlah dokumen evaluasi dana gerdema dan RT Bersih	Dokumen		1

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**  
**BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

		13 Jumlah dokumen kegiatan DP3KTNKM	Dokumen		1
		14 Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi yang diikuti	Dokumen		1
2	<b>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan</b>	15 Buku profil daerah	Buku	20	35
		16 Jumlah Buku LKPJ Bupati Malinau Tahunan	Buku	60	50
		17 Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah yang tersusun	Laporan	1	1
		18 Jumlah laporan TPB/SDGs	Laporan	0	1
		19 Tersedianya kawasan tanpa rokok	Dokumen	0	1
		20 Jumlah koordinasi, konsultasi perencanaan bidang sosial budaya yang diikuti	Kali	0	25
3	<b>Meningkatkan Kualitas dan Sumber Daya dan Pelayanan Umum Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>	21 Jumlah ATK yang tersedia	Jenis	33	17
		22 Jumlah barang cetak dan foto copy	Jenis	2	2
		23 Jumlah kotak makanan rapat	Kotak	205	770
		24 Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Kali/Kegiatan	15	25
		25 Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Kali/Kegiatan	0	25
		26 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	2
		27 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 roda 4 & 6 roda 2	8	8

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2019 secara umum telah menyelesaikan program dan kegiatan yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar 97,58% sehingga masuk dalam kategori berhasil.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan kemampuan organisasi yang ada. Keberhasilan yang telah dicapai tetap harus selalu dievaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi akan berbeda. Untuk itu sikap taktis dan responsive harus terus menerus dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga harus bisa dimanfaatkan guna memacu kinerja instansi.

Kami berharap Laporan Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2019 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, dan semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malinau,  
Kepala Bappeda dan Litbang

Dr. Kristian, M.Si  
NIP. 19661123 199503 1 001